



JIMMBA

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi

Homepage: <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jimmba/index>

Pengaruh Pemberian *Unconditional Transfer* Terhadap *Tax Effort* Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Ayunindya Prima Florenza¹, Mispiyanti²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa

Email: ayunindyafloo@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received:

Accepted:

Published:

Keywords:

Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, *Tax Effort* Daerah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Unconditional Transfer* yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap *Tax Effort* Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu statistik deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa laporan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berupa data laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan *SPSS 23 for Windows*. Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) yaitu diperoleh *Adjusted R Square* sebesar 10,6% yang menunjukkan bahwa *Tax Effort* Daerah dipengaruhi oleh variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap *Tax Effort* Daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap *Tax Effort* Daerah.

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditandai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah (kabupaten dan kota) diberikan kewenangan dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber dana, untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Adanya kewenangan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa daerah dituntut mandiri, mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah, serta mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Kesenjangan fiskal sebab letak geografis dan sumber daya yang berbeda di tiap daerah merupakan kendala dalam implementasi otonomi daerah. PAD yang diharapkan dapat digali secara maksimal dan mampu menunjang kemandirian daerah dengan potensi yang dimiliki daerah, kenyataannya masih jauh untuk dapat terlaksana. Kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat memberikan bantuan transfer kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Perimbangan Daerah.

Jenis transfer terbagi menjadi dua macam yaitu *Conditional Grants* (Transfer Bersyarat) di Indonesia adalah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan *Unconditional Grants* (Transfer Tidak Bersyarat) terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pelaksanaan *unconditional transfer* menjadi sumber dana utama dalam menunjang program pembangunan daerah, sehingga dalam penelitian ini, penulis hanya akan meneliti transfer pusat tidak bersyarat/ *unconditional transfer*.

Upaya optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah salah satunya berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi adalah iuran yang dapat dipaksakan oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (UU No. 28 Tahun 2009). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Distribusi pajak dan retribusi daerah sangat bervariasi antar daerah, hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang besar dalam jumlah penduduk, demografi, dan kemampuan masyarakat.

Tax Effort adalah jumlah pajak daerah yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh pemerintah daerah yang dibandingkan dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak suatu daerah (Yunita, 2017: 5). Kemampuan bayar pajak suatu daerah lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam periode tertentu. Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak akan meningkat (Yunanto, 2010). *Tax effort* daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ada yang mengalami peningkatan atau penurunan. Hal ini sesuai dengan tabel *tax effort* pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. *Tax Effort* Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Tax Effort	
	2017	2018
Kab. Cilacap	0,15%	0,17%
Kab. Banyumas	0,44%	0,42%
Kab. Purbalingga	0,26%	0,25%
Kab. Banjarnegara	0,26%	0,29%
Kab. Kebumen	0,33%	0,37%

Kab. Purworejo	0,33%	0,40%
Kab. Wonosobo	0,24%	0,24%
Kab. Magelang	0,40%	0,41%
Kab. Boyolali	0,37%	0,44%
Kab. Klaten	0,31%	0,31%
Kab. Sukoharjo	0,70%	0,69%
Kab. Wonogiri	0,19%	0,20%
Kab. Karanganyar	0,48%	0,49%
Kab. Sragen	0,26%	0,24%
Kab. Grobogan	0,30%	0,30%
Kab. Blora	0,22%	0,22%
Kab. Rembang	0,37%	0,57%
Kab. Pati	0,20%	0,21%
Kab. Kudus	0,11%	0,11%
Kab. Jepara	0,34%	0,37%
Kab. Demak	0,57%	0,57%
Kab. Semarang	0,40%	0,33%
Kab. Temanggung	0,20%	0,20%
Kab. Kendal	0,30%	0,30%
Kab. Batang	0,35%	0,37%
Kab. Pekalongan	0,24%	0,31%
Kab. Pemasang	0,29%	0,32%
Kab. Tegal	0,32%	0,32%
Kab. Brebes	0,20%	0,22%
Kota Magelang	0,41%	0,42%
Kota Surakarta	0,70%	0,77%
Kota Salatiga	0,44%	0,45%
Kota Semarang	0,77%	0,76%
Kota Pekalongan	0,66%	0,70%
Kota Tegal	0,53%	0,59%

Sumber: Data diolah, Terlampir

Dari hasil perhitungan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan PDRB pada tahun 2017-2018, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan atau penurunan *tax effort* daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mengalami peningkatan upaya pajak sebesar 57,1%, daerah yang tidak mengalami perubahan upaya pajak sebesar 25,7%, dan daerah yang mengalami penurunan upaya pajak sebesar 17,1%. Upaya pajak yang beragam dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah bisa jadi disebabkan karena pelaksanaan otonomi daerah, sehingga ada tuntutan untuk peningkatan kemandirian daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu dari penerimaan pajak daerah. Upaya pajak/ *tax effort* daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi *tax effort* daerah yaitu pemberian *unconditional transfer* dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kajian Teori dan Telaah Literatur

Teori transfer

Menurut Rosen dan Gayer (2010) dalam Kartika (2015: 48), secara umum terdapat dua jenis transfer, yaitu Transfer Bersyarat (*Conditional Grants*) dan Transfer Tidak Bersyarat (*Unconditional Grants*). Transfer bersyarat merupakan transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat juga menetapkan tujuan yang spesifik dalam penggunaan dana transfer bersyarat, misalnya untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sedangkan *Unconditional grants* atau sering disebut juga *revenue sharing* diberikan kepada pemerintah daerah tanpa persyaratan tertentu, yang pengelolannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah dan diawasi oleh pemerintah pusat. Dalam pengertian lain pemerintah daerah dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan kepentingan daerah yang bersangkutan tanpa ada batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Transfer ini bertujuan untuk pemerataan pendapatan antar daerah dan merupakan dana pendukung pelaksanaan program/ proyek pembangunan yang menjadi prioritas daerah.

Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam periode tertentu.

Tax Effort

Menurut Yunita (2017: 5) *tax effort* (upaya penyerapan pajak) adalah jumlah pajak daerah yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh pemerintah daerah yang dibandingkan dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak suatu daerah. Kapasitas pajak di daerah didekati dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto. *Tax Effort* menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tax Effort

Upaya pajak/ *tax effort* merupakan aspek yang relevan dengan kemandirian daerah. Kemandirian daerah seringkali diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi yang besar. *Tax effort* menunjukkan upaya pemerintah untuk menghasilkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Adanya pemberian DAU diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan PAD, baik melalui pajak maupun retribusi daerah dikarenakan adanya dukungan pembiayaan yang memadai, namun daerah

merespon berbeda. Daerah menjadi tidak mandiri, mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah. Padahal DAU seharusnya menjadi pendorong bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Tax Effort

Upaya pajak/ *tax effort* merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah. *Tax effort* menunjukkan upaya pemerintah untuk menghasilkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, namun pemberian DBH seringkali dipandang sebagai sumber utama pendapatan, sehingga pada akhirnya daerah mengabaikan potensi pendapatan daerah secara mandiri, salah satunya dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Metode Penelitian

Populasi dan teknik pengumpulan data

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik documenter, yaitu data mengenai laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yakni data DAU, DBH dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah yang diunduh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id). Data juga diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (www.jateng.bps.go.id) berupa data PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Definisi Operasional Variabel

Tax Effort

Tax effort merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bayar pajak suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

$$Tax\ Effort = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}{PDRB\ Kabupaten/Kota} \times 100\%$$

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengukuran variabel Dana Alokasi Umum dalam penelitian ini adalah angka realisasi DAU dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2018.

Dana Bagi Hasil

Menurut Nordiawan, *et al* (2012: 49) definisi dari Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengukuran variabel Dana Bagi Hasil dalam penelitian ini adalah penerimaan DBH dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2018.

Hasil dan Pembahasan

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila probabilitas *asym.sig* > 0,05 maka data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan besarnya nilai signifikansi *Asym. Sig.* (2-tailed) sebesar 0,557 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**Tabel 2. Hasil Pengujian
One-Sample Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	
N		70	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.07947176	
Most Extreme Differences	Absolute	.093	
	Positive	.093	
	Negative	-.063	
Test Statistic		.093	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.557 ^e	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.544
		Upper Bound	.570

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data yang diolah, 2019

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Apabila nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,929 yang menunjukkan lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) sebesar 1,076 yang

menunjukkan kurang dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
SQRT2_X1	.929	1.076
SQRT2_X2	.929	1.076

a. Dependent Variable: SQRT2_Y

Sumber: Data yang diolah, 2019

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*. Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,145. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel (n)=70 dan jumlah variabel independen (k)=2. Nilai *Durbin-Watson* 2,145 lebih besar dari batas atas (du) 1,6715 dan lebih kecil dari 2,3285 (4-du). Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Pengujian Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.363 ^a	.132	.106	.08065	2.145

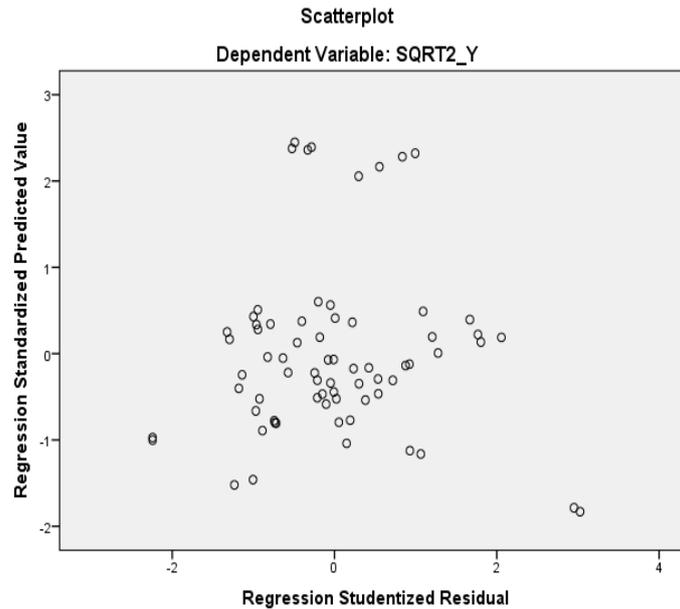
a. Predictors: (Constant), SQRT2_X2, SQRT2_X1

b. Dependent Variable: SQRT2_Y

Sumber: Data yang diolah, 2019

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika pola yang dihasilkan membentuk titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu, ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada grafik *scatterplot* menunjukkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linier berganda merupakan bentuk regresi dengan jumlah variabel bebasnya lebih dari satu dengan tingkat signifikan 0,05 untuk melihat pengaruh *unconditional transfer* terhadap *tax effort* daerah.

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	12.470	3.684		3.385	.001
	SQRT2_X1	-4.081	1.603	-.301	-2.546	.013
	SQRT2_X2	-1.059	.895	-.140	-1.183	.241

a. Dependent Variable: SQRT2_Y

Sumber: Data yang diolah, 2019

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini menggunakan *level of significance* (α) 0,05. Apabila nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau hipotesis diterima. Berdasarkan hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa dua variabel yang dimasukkan dalam model yang mempengaruhi *Tax Effort* Daerah hanya variabel Dana Alokasi Umum.

**Tabel 6. Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	12.470	3.684		3.385	.001
	SQRT2_X1	-4.081	1.603	-.301	-2.546	.013
	SQRT2_X2	-1.059	.895	-.140	-1.183	.241

a. Dependent Variable: SQRT2_Y

Sumber: Data yang diolah, 2019

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 5,098 dengan tingkat signifikansi $0,009 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap *Tax Effort* Daerah.

**Tabel 7. Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.066	2	.033	5.098	.009 ^b
	Residual	.436	67	.007		
	Total	.502	69			

a. Dependent Variable: SQRT2_Y

b. Predictors: (Constant), SQRT2_X2, SQRT2_X1

Sumber: Data yang diolah, 2019

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinan R² dalam regresi berganda bertujuan untuk mengetahui berapa besar peran atau kontribusi dari beberapa variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi tersebut dalam menjelaskan nilai variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,106 atau 10,6% hal ini berarti bahwa 10,6% yang menunjukkan bahwa *Tax Effort* Daerah dipengaruhi oleh variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan sisanya sebesar 89,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 8. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.363 ^a	.132	.106	.08065

a. Predictors: (Constant), SQRT2_X2, SQRT2_X1

b. Dependent Variable: SQRT2_Y

Sumber: Data yang diolah, 2019

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tax Effort Daerah

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap *Tax Effort* Daerah. Berdasarkan hasil analisis dari uji t pada variabel Dana Alokasi Umum, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum (X_1) sebesar $0,013 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap *Tax Effort* Daerah.

Hal ini menunjukkan terdapat kecenderungan bahwa ketika Dana Alokasi Umum yang diterima semakin tinggi maka *tax effort* (upaya pajak) pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah justru menjadi semakin rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adi (2008) mengenai relevansi transfer pemerintah pusat dengan upaya pajak daerah pada pemerintah kabupaten dan kota se Jawa menyimpulkan bahwa transfer pemerintah pusat memberikan pengaruh negatif terhadap upaya pajak daerah. DAU bersifat hibah yang kewenangan pengeluarannya diserahkan penuh kepada daerah, maka terdapat kecenderungan upaya untuk mempertahankan dana hibah ini.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Tax Effort Daerah

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap *Tax Effort* Daerah. Berdasarkan hasil analisis dari uji t pada variabel Dana Bagi Hasil, menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel Dana Bagi Hasil (X_2) sebesar $0,241 > 0,05$.

Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak, artinya pemberian transfer dalam hal ini pemberian dana bagi hasil tidak memberikan pengaruh terhadap *tax effort* di tingkat daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Subhan (2017) yang menemukan bahwa pemberian dana bagi hasil pada pemerintah kabupaten di Madura tidak berpengaruh terhadap capaian *tax effort* daerah. Semakin tinggi atau semakin rendah jumlah Dana Bagi Hasil yang diterima daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak mempengaruhi terhadap *tax effort* (upaya pajak). Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan upaya pajak ataupun tidak melakukan upaya pajak, tidak dipengaruhi terkait berapapun jumlah DBH yang diperoleh daerah tersebut.

Penutup dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel Dana Alokasi Umum (X_1) sebesar $0,013 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap *Tax Effort* Daerah, terdapat kecenderungan bahwa ketika Dana Alokasi Umum yang

diterima semakin tinggi maka upaya pajak (*tax effort*) pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah justru menjadi semakin rendah.

- b. Variabel Dana Bagi Hasil (X_2) sebesar $0,241 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian transfer dalam hal ini pemberian dana bagi hasil tidak memberikan pengaruh terhadap *tax effort* di tingkat daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Hasil uji F (simultan) diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 5,098 dengan tingkat signifikansi $0,009 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap *Tax Effort* Daerah.
- d. Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 10,6% yang menunjukkan bahwa *Tax Effort* Daerah dipengaruhi oleh variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan sisanya sebesar 89,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- a. Untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap besarnya *unconditional transfer* dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah harus mengupayakan untuk memaksimalkan potensi daerahnya yang akan berdampak pada meningkatnya PAD, seperti: intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak serta eksplorasi sumber daya alam.
- b. Kepada pemerintah pusat *unconditional transfer* supaya dialokasikan dengan sasaran dan tujuan yang tepat dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan daerah yang bersangkutan.
- c. Untuk peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian mengenai *tax effort* agar semakin memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah jumlah provinsi se Indonesia dan variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Referensi

- Adi, P.H. 2008. Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak Daerah. *Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana*. Salatiga.
- Ardhani, S.V. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Tax Effort (Upaya Pajak) dan Alokasi Belanja Modal di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Ariani, K.R. 2010. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

- Asmawanti, D., N. Elvandari, dan Baihaqi. 2016. Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 6 (1). Hal. 35-52.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Ghozali, I. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan IBM SPSS 22*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2012. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> Diakses pada 2 Oktober 2019. Pukul 13:00.
- <http://www.jateng.bps.go.id> Diakses pada 29 September 2019. Pukul 10:00.
- <http://www.ptun-semarang.go.id> Profil Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 15 Desember 2019. Pukul 19.00.
- Indriantoro, Nur, dan B. Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Kartika, M. 2015. Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 4. No. 1. Hal: 45-71.
- Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE Unbraw. Malang.
- Kolinug, F.C., A.G. Kumenaung, dan D. Ch. Rotinsulu. 2013. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Kusumadewi, D. A., dan A. Rahman. 2007. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 11. No.1. Hal: 67-80.
- Nordiawan, D., Putra, I.S., dan Rahmawati, M. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*. Jakarta.
- Purnomo, H.B. 2011. Flypaper Effect Pada Pengaruh Transfer Tidak Bersyarat dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2007-2010.
- Saberan, H. 2002. *Produk Domestik Regional Bruto*. Rajawali. Jakarta.
- Samad, R.P., dan Iyan R.Y. 2013. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*. Vol. 3. No. 8. Hal: 103-122.

- Sidik, M. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Bandung.
- Subhan. 2017. Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap *Tax Effort*. (Studi Pada Pemerintah Kabupaten di Madura). *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*. Vol. 7. No. 1. Hal: 85-108.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Waskitho, G. 2017. Pengaruh Pemberian Unconditional Transfer Terhadap Tax Effort Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung). *Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Wijaya, T. 2010. *Analisis Multivariat*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Yunanto, L. 2010. Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Yunita, A. 2017. Pengaruh Kemandirian Daerah, Tax Effort dan Kepadatan Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Equity*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.